Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 5, December 2026, p 311-321
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24212340

Manajemen Strategi dalam Penguatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya

Strategic Management In Strengthening The Socialization of National Insight By The National Unity And Politics Agency of Surabaya City

Ghina Adlillah[1], Neny Ayu Nourmanita[2], Meirinawati[3], Trenda Aktiva Oktariyanda[4]
[1.2.3.4]S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO
Article history:
Received 05 October 2026
Revised 15 October 2026
Accepted 29 October 2026
Available online 14 November 2026

Keywords
Strategis management, national insight socialization, Bakesbangpol, Surabaya City

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
The National Unity And Politics Agency Of Surabaya City (Bakesbangpol) is implementing a national insight socialization program in a city that excels in public service innovation (1,214 innovations in 2025), but is only ranked 14th in the 2025 Tolerant City Index. Initial interviews indicate that the socialization still uses conventional face-to-face methods since the program began, and social friction such as inter-group brawls still occur so that the impact of the national insight socialization is not optimal. This study aims to analyze strategic management in strengthening the socialization of national insight by the Surabaya City Bakesbangpol. The study uses a descriptive qualitative approach with a focus on the National Unity Sector. The analysis refers to four elements of strategic management (Wheelen et al., 2018), namely environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and control. Informants were determined by purposive sampling and consisted of Sector 1 employees, structural officials, and representatives of the target community. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies, with the researcher as the main instrument. Data validity was maintained through source triangulation. Data were analyzed using an interactive model (Miles et al., 2022), consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

ABSTRAK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya menjalankan program sosialisasi wawasan kebangsaan di kota yang unggul dalam inovasi pelayanan publik (1.214 inovasi pada 2025), tetapi hanya menempati peringkat ke-14 dalam Indeks Kota Toleran 2025. Wawancara awal menunjukkan bahwa sosialisasi masih memakai metode konvensional tatap muka sejak program dimulai, dan gesekan sosial seperti tawuran antarkelompok masih terjadi sehingga dampak dari sosialisasi wawasan kebangsaan dampaknya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen strategis dalam penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Bakesbangpol Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada Bidang Kesatuan Bangsa. Analisis mengacu pada empat elemen manajemen strategis (Wheelen et al., 2018), yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Informan ditentukan secara *purposive sampling* dan terdiri dari pegawai Bidang 1, pejabat struktural, dan perwakilan masyarakat sasaran. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber. Data dianalisis dengan model interaktif (Miles et al., 2022), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan seiring perubahan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut organisasi pemerintah untuk mampu beradaptasi melalui pengelolaan program yang terarah dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah manajemen strategi, yaitu proses yang membantu organisasi dalam menentukan tujuan jangka panjang, merumuskan kebijakan, serta mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Penerapan manajemen strategi dalam organisasi publik menjadi penting karena dapat mendukung efektivitas kebijakan,

*Corresponding Author
e-mail: ghina.23416@mhs.unesa.ac.id

efisiensi penggunaan sumber daya, serta meningkatkan legitimasi publik terhadap instansi pemerintah (Sukmiridiyanto et al., 2024; Usman et al., 2026). Pentingnya manajemen strategi tersebut sejalan dengan arah reformasi birokrasi Indonesia yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pemerintah. Berdasarkan data tahun2024, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 88,9 dengan kategori sangat baik, sedangkan Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 3,93 menjadi 4,02 (Qonita, 2026). Walaupun menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pada seluruh sektor pemerintahan, termasuk sektor kesatuan bangsa dan politik yang memiliki peran dalam menjaga persatuan serta memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2025 yang mencapai 77,89, sebagai capaian tertinggi dalam sebelas tahun terakhir. Namun, dimensi kebersamaan hanya memperoleh skor 65,49, lebih rendah dibandingkan dimensi toleransi yang mencapai 88,82 (KEMENAG, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kerukunan tidak cukup hanya melalui penanaman sikap toleransi, tetapi juga perlu diikuti dengan peningkatan kebersamaan dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan masih menjadi hal penting yang perlu diperhatikan melalui program pemerintah yang terarah.

Tantangan tersebut juga terlihat di Provinsi Jawa Timur, khususnya berkaitan dengan potensi intoleransi dan radikalisasi yang terlihat di kalangan anak dan remaja akibat paparan ideologi ekstrem melalui media sosial (Times Indonesia, 2025). Perhatian terhadap persoalan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Dialog Kebangsaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama satuan pendidikan di Surabaya untuk memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan pelajar (Victoria, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan wawasan kebangsaan membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah, termasuk melalui peran instansi yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik.

Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji ialah Kota Surabaya. Sebagai kota yang dikenal dengan perkembangan inovasi pelayanan publik, Surabaya berhasil menghasilkan 1.214 inovasi sepanjang tahun 2025 dan mempertahankan predikat Kota Terinovatif peringkat pertama dalam *Innovative Government Award* 2025 (Diskominfo, 2025). Pada Mei 2026, Surabaya juga memperoleh *National Governance Award* dalam kategori pelayanan publik terintegrasi (Diskominfo, 2026). Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi toleransi masyarakat. Berdasarkan Indeks Kota Toleran tahun 2025, Surabaya berada pada peringkat ke-14 secara nasional dan belum masuk dalam sepuluh besar kota paling toleran di Indonesia (Yosarie & Hasan, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberhasilan inovasi pelayanan publik dan tantangan dalam memperkuat kerukunan serta wawasan kebangsaan masyarakat.

Kesenjangan tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan program sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya. Melalui laman resminya, Bakesbangpol menjelaskan bahwa penyampaian materi sosialisasi telah dilakukan secara komunikatif dan interaktif dengan memberikan ruang diskusi serta contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat (Bakesbangpol, 2025). Meskipun demikian, pelaksanaannya masih banyak mengandalkan pertemuan tatap muka dengan melibatkan unsur RT, RW, dan Karang Taruna. Hasil wawancara awal dengan staf pengelola program pada 17 Juli 2026 juga menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan sejak program dimulai masih bersifat konvensional dan belum pernah dikembangkan melalui inovasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi masih memiliki ruang untuk dikembangkan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat

Permasalahan tersebut semakin relevan ketika melihat masih munculnya gesekan sosial di tengah masyarakat, salah satunya tawuran antarkelompok di kawasan Embong Malang. Peristiwa tersebut mendorong Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk meminta Bakesbangpol lebih aktif melakukan deteksi dini serta memperkuat pembinaan dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan (Satrio, 2025). Di sisi lain, Bakesbangpol sebenarnya telah berupaya memperluas jangkauan program dengan melibatkan tokoh masyarakat, RT, RW, Kader Surabaya Hebat, dan Karang Taruna sebagai pihak yang diharapkan dapat menyebarluaskan nilai kerukunan, toleransi, dan persatuan kepada lingkungan sekitarnya (Wawancara, 31 Juli 2026). Namun, pelibatan berbagai unsur masyarakat tersebut masih perlu didukung dengan pengelolaan program yang lebih optimal agar pesan kebangsaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas strategi dan pelaksanaan program wawasan kebangsaan maupun pengelolaan organisasi publik. Agustiani et al. (2025) mengkaji strategi Bakesbangpol Kota Bekasi dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan menemukan bahwa pelaksanaannya masih banyak bertumpu pada metode penyuluhan tatap muka. Penelitian Hartanti dan Sunarso (2024) di Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa sosialisasi wawasan kebangsaan masih didominasi seminar dan sarasehan, sementara pemanfaatan media sosial belum optimal. Sementara itu, Priyowidodo et al. (2024) dan Sangaji dan Irianto (2025) membahas transformasi digital serta inovasi pelayanan publik dengan menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan dalam mendukung perubahan. Adapun Aliy et al. (2026) mengkaji penerapan manajemen strategi pada pengembangan kawasan wisata Kya-Kya di Kota Surabaya yang berfokus pada sektor pariwisata dan budaya.

Berdasarkan dari penelitian tersebut, kajian mengenai manajemen strategi dalam penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas metode sosialisasi, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, maupun penerapan manajemen strategi pada sektor pemerintahan yang berbeda. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji proses manajemen strategi dalam pengelolaan program sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Bakesbangpol Kota Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis pengelolaan program melalui empat tahapan manajemen strategi menurut Wheelen et al. (2018), yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen strategi dalam penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pengelolaan program sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pelaksanaan sosialisasi agar lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam terkait fenomena sosial yang sedang diteliti, khususnya persepsi, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian terhadap manajemen strategi dalam penguatan sosialisasi wawasan kebangsan, tanpa intervensi atau manipulasi variabel (Creswell & Creswell, 2022). Data berupa kata-kata, narasi, dan dokumentasi visual, bukan angka. Dalam penelitian kualitatif diperlukan fokus agar kajian lebih terarah, sehingga peneliti menetapkan batasan penelitian (Rukin, 2022). Fokus penelitian ini adalah manajemen strategis Bakesbangpol Kota Surabaya dalam penguatan program sosialisasi

wawasan kebangsaan. Indikator pendukung fokus mengacu pada teori manajemen strategi dari (Wheelen et al., 2018), yang meliputi pengamatan lingkungan (*environmental scanning*), implementasi strategi (*strategy implementation*), perumusan strategi (*strategy formulation*), serta evaluasi dan pengendalian (*evaluation and control*).

Lokasi penelitian berada di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2, Ketabang, Kecamatan Genteng, dengan fokus pada Bidang Kesatuan Bangsa (Bidang 1). Bidang ini dipilih karena berperan strategis dalam perumusan startegi, pelaksanaan kegiatan, dan pemberi sosialisasi langsung kepada masyarakat sasaran. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data prier diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langusg pada kegiatan sosialisasi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (Etikan, 2022), yaitu pegawai Bidang 1 yang menangani program, pejabat struktural yang berwenang dalam perumusan kebijakan dan pengawasan program, serta perwakilan masyarakat sasaran yang mengikuti sosialisasi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa rencana strategis, data pelaksanaan sosialisasi, peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dan wawasan kebangsaan, arsip perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta publikasi dan pemberitaan resmi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari waancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell & Creswell, 2022). Analisis data menggunakan model interaksi (Miles et al., 2022) yang berlangsung simultan melalui reduksi data, penyajian data dalam narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan, sehingga data dapat diinterpretasikan dengan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen startegis dalam penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol Kota Surabaya) telah dilaksankan melalui empat tahapan, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Keempat tahapan tersebut memperlihatkan bagaimana Bakesbangpol memahami kondisi organisasi dan masyarakat, menentukan arah program, melaksanakan kegiatan, serta menilai hasil pelaksanaannya. Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat.

Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*)

Pengamatan lingkungan merupakan tahap awal dalam manajemen strategis yang dilakukan untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi sebelum menentukan strategi. Berdasarkan hasil penelitian, Bakesbangpol Kota Surabaya telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana menjadi kendala utama. Pelaksanaan program masih ditangani oleh tiga orang pegawai yang juga memiliki tanggung jawab pekerjaan lainnya. Keterbatasan anggaran turut memengaruhi jumlah peserta dan frekuensi kegiatan, sedangkan kebutuhan transportasi serta perlengkapan seperti proyektor, mikrofon, *sound system*, dan kursi masih bergantung pada kendaraan pribadi maupun bantuan dari pihak kecamatan dan kelurahan. Meskipun demikian, komitmen para pelaksana untuk tetap menjalankan program di tengah keterbatasan tersebut menjadi salah satu kekuatan organisasi.
Dari sisi eksternal, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain keberadaan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang menjadi landasan pelaksanaan program, serta dukungan dari RT, RW, Karang Taruna, kecamatan, dan kelurahan. Masyarakat menilai sosialisasi wawasan kebangsaan penting untuk menumbuhkan nasionalisme, menjaga toleransi, dan memperkuat kerukunan. Di sisi lain,

Bakesbangpol juga menghadapi ancaman berupa gesekan sosial di masyarakat dan paparan ideologi ekstrem melalui media sosial, khususnya bagi generasi muda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan dan karakteristik kelompok sasaran.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Bakesbangpol telah berupaya mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui pengamatan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep *environmental scanning* dari Wheelen et al. (2018), yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Akan tetapi, identifikasi kondisi lingkungan perlu diikuti dengan pemanfaatan peluang secara lebih konkret. Dukungan masyarakat dan perkembangan teknologi, misalnya, dapat menjadi modal untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Dalam penelitian ini, rencana penyediaan materi yang dapat diakses melalui telepon genggam serta penggunaan tes secara digital telah muncul sebagai gagasan, tetapi belum diterapkan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, kemampuan Bakesbangpol dalam membaca kondisi lingkungan sudah terlihat, meskipun pemanfaatan hasil pengamatan tersebut masih perlu diperkuat melalui langkah yang lebih nyata.



Gambar 1. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Tatap Muka
Sumber: Dokumentasi Peneliti,2026



Gambar 2. Pengerjaan *Pre-test* dan *Post-test*
Sumber: Dokumentasi Peneliti,2026

Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Tahap perumusan strategi berkaitan dengan penentuan tujuan, sasaran, serta langkah yang akan digunakan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kota Surabaya memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat nasionalisme, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah

keberagaman masyarakat Surabaya. Tujuan tersebut menjadi penting karena karakteristik masyarakat Surabaya yang beragam membutuhkan pemahaman kebangsaan yang dapat memperkuat sikap saling menghargai dan menjaga kerukunan.

Penentuan sasaran sosialisasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan hasil survei serta nilai *pre-test* dan *post-test* peserta. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, delapan kecamatan atau kelurahan dengan nilai pengetahuan wawasan kebangsaan terendah diprioritaskan sebagai sasaran kegiatan. Cara ini menunjukkan bahwa penentuan sasaran tidak sepenuhnya dilakukan secara umum, tetapi telah mempertimbangkan kebutuhan wilayah yang dinilai memerlukan penguatan pemahaman wawasan kebangsaan. Sementara itu, materi sosialisasi disusun dengan memperhatikan keberagaman suku dan agama di Kota Surabaya. Dalam prosesnya, PIC program berdiskusi dengan Kepala Bidang 1 untuk menentukan tema kegiatan dan melibatkan narasumber dari akademisi Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta TNI atau POLRI. Penyampaian materi dilakukan melalui dialog interaktif dan sesi tanya jawab agar masyarakat dapat terlibat secara langsung.

Jika dikaitkan dengan teori Wheelen et al. (2018), perumusan strategi yang dilakukan Bakesbangpol telah memperlihatkan adanya hubungan antara kondisi lingkungan dengan penentuan arah program. Keterbatasan sumber daya mendorong penentuan sasaran secara lebih terarah, sedangkan keberagaman masyarakat menjadi pertimbangan dalam pemilihan materi dan narasumber. Strategi tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya disusun berdasarkan tujuan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menjadi penerima sosialisasi. Meskipun demikian, strategi yang dirumuskan masih lebih banyak diarahkan pada penguatan pelaksanaan sosialisasi secara langsung. Gagasan mengenai penggunaan media digital belum menjadi bagian dari strategi yang diterapkan karena masih berada pada tahap perencanaan. Artinya, perumusan strategi telah memiliki arah yang cukup jelas, tetapi masih memerlukan pengembangan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Implementasi strategi merupakan proses menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam program dan tindakan nyata. Dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan, Bakesbangpol Kota Surabaya telah memiliki alur kegiatan yang cukup terstruktur. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak kecamatan dan kelurahan, penyusunan serta penyebaran undangan kepada masyarakat dan narasumber, hingga koordinasi peminjaman tempat dan perlengkapan kegiatan. Setelah sosialisasi selesai, PIC program menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada pimpinan. Pelaksanaan tersebut melibatkan tim internal Bakesbangpol serta dukungan pihak kecamatan dan kelurahan, terutama dalam penyebaran undangan dan penyediaan fasilitas.

Namun, implementasi program masih menghadapi kendala dalam menjangkau peserta sesuai kuota yang telah ditentukan. Kegiatan yang umumnya dilaksanakan pada jam kerja membuat sebagian masyarakat kesulitan hadir karena memiliki pekerjaan maupun tanggung jawab rumah tangga. Kondisi ini juga disampaikan oleh Ketua RT 05 Margorejo yang menilai bahwa kegiatan sebaiknya dimulai lebih pagi, sekitar pukul 07.30 atau 08.00 WIB, agar lebih banyak warga dapat mengikuti sosialisasi. Untuk mengatasi kekurangan jumlah peserta, tim pelaksana terkadang meminta bantuan staf kecamatan agar kuota kegiatan dapat terpenuhi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi pelaksanaan telah berjalan, keterjangkauan masyarakat masih dipengaruhi oleh kesesuaian waktu kegiatan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Apabila dianalisis menggunakan konsep *strategy implementation* dari Wheelen et al. (2018), Bakesbangpol telah berupaya menerjemahkan strategi ke dalam kegiatan melalui pembagian tugas, koordinasi, dan dukungan sumber daya dari pihak terkait. Kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan menjadi langkah penting untuk mengatasi keterbatasan internal, sehingga kegiatan tetap dapat dilaksanakan. Akan tetapi, ketergantungan terhadap dukungan pihak eksternal juga memperlihatkan bahwa kapasitas sumber daya internal belum sepenuhnya memadai. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang belum menyesuaikan waktu dengan aktivitas masyarakat menunjukkan bahwa implementasi strategi perlu memperhatikan kondisi kelompok sasaran, bukan hanya kelancaran prosedur kegiatan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari terlaksananya sosialisasi, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan program dalam mengikutsertakan masyarakat secara lebih luas.

Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*)

Evaluasi dan pengendalian merupakan tahap untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan strategi telah berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, Bakesbangpol Kota Surabaya telah melakukan evaluasi melalui beberapa tingkatan. Pada tingkat pelaksana, PIC program menggunakan kuesioner yang memuat *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Peningkatan nilai *post-test* dibandingkan dengan *pre-test* digunakan sebagai salah satu indikator bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang disampaikan. Pada tingkat tim kerja, Katimja Bidang 1 melakukan evaluasi secara rutin setiap bulan bersama staf untuk membahas pelaksanaan program, termasuk capaian *output* dan *outcome*. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui rapat. Sementara itu, Kepala Bidang 1 turut memperhatikan kesesuaian materi, penyampaian narasumber, waktu kegiatan, dan kinerja tim pelaksana.

Dari sisi masyarakat, kegiatan sosialisasi dinilai memberikan manfaat karena menambah pengetahuan mengenai nasionalisme, cinta tanah air, serta pentingnya sikap saling menghargai. Meskipun demikian, masyarakat juga menyampaikan beberapa masukan. Waktu pelaksanaan yang dinilai terlalu siang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dapat mengurangi kesempatan warga untuk hadir. Selain itu, perwakilan Karang Taruna dan Ketua RT 05 Margorejo mengharapkan agar materi sosialisasi dapat diakses melalui media sosial atau telepon genggam. Bahkan, masyarakat menyatakan kesediaannya untuk membantu menyebarkan materi melalui grup WhatsApp di lingkungan RT dan RW. Masukan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan kegiatan sosialisasi secara langsung, tetapi juga akses terhadap materi yang lebih mudah dijangkau dan dapat dipelajari kembali.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan pengendalian di Bakesbangpol telah berjalan melalui pengukuran pemahaman peserta, evaluasi internal, serta penerimaan masukan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Wheelen et al. (2018), bahwa evaluasi dan pengendalian dilakukan dengan memantau hasil pelaksanaan strategi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan perbaikan. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang untuk memperkuat tindak lanjut atas temuan evaluasi. Penggunaan *pre-test* dan *post-test* telah memberikan gambaran mengenai perubahan pemahaman peserta yang hadir, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan sejauh mana pesan wawasan kebangsaan menjangkau masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan secara langsung. Demikian pula, masukan mengenai waktu pelaksanaan dan kebutuhan media digital perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang lebih konkret. Dengan demikian, evaluasi sebaiknya tidak hanya menjadi

kegiatan rutin untuk menilai keberhasilan pelaksanaan, tetapi juga menjadi dasar dalam menyesuaikan strategi dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen strategis Bakesbangpol Kota Surabaya dalam penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan telah mencakup empat tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Wheelen et al. (2018). Bakesbangpol telah mengenali kondisi internal dan eksternal, menetapkan tujuan serta sasaran, melaksanakan kegiatan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, dan melakukan evaluasi terhadap hasil sosialisasi. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya, belum diterapkannya inovasi digital, kendala waktu pelaksanaan, serta jangkauan peserta yang belum optimal masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penguatan manajemen strategis tidak hanya membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan program yang terstruktur, tetapi juga kemampuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi serta menyesuaikan metode sosialisasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen strategis dalam penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah dilakukan melalui empat tahapan manajemen strategis menurut Wheelen et al. (2018), yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Pada tahap pengamatan lingkungan, Bakesbangpol Kota Surabaya telah mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana hingga adanya dukungan dari kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna. Hasil pengamatan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program, termasuk menentukan wilayah sasaran berdasarkan hasil survei serta nilai *pre-test* dan *post-test*. Selanjutnya, perumusan strategi dilakukan dengan menetapkan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat nasionalisme, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Surabaya. Strategi tersebut kemudian diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung dengan materi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, serta melibatkan narasumber dari berbagai pihak, seperti akademisi, FKUB, dan TNI/POLRI.

Meskipun keempat tahapan manajemen strategis telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan program sosialisasi wawasan kebangsaan masih menghadapi beberapa kendala. Pada tahap implementasi, keterbatasan jumlah pegawai dan fasilitas membuat pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada dukungan pihak kecamatan dan kelurahan. Selain itu, kegiatan yang umumnya dilaksanakan pada jam kerja menyebabkan jumlah peserta terkadang belum memenuhi kuota yang ditentukan. Sementara itu, pada tahap evaluasi dan pengendalian, Bakesbangpol telah melakukan penilaian melalui pre-test dan post-test, diskusi evaluasi rutin, serta masukan dari masyarakat. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, tetapi masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait waktu pelaksanaan dan jangkauan sosialisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis Bakesbangpol Kota Surabaya dalam penguatan sosialisasi wawasan kebangsaan telah berjalan melalui tahapan yang cukup terarah, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat. Ke depannya, diperlukan upaya untuk mengembangkan metode sosialisasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan memanfaatkan media digital agar pesan wawasan kebangsaan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap konflik sosial.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dalam memperkuat program sosialisasi wawasan kebangsaan. Pertama, Bakesbangpol Kota Surabaya perlu mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan kegiatan agar lebih menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat. Kegiatan yang selama ini banyak dilaksanakan pada jam kerja terkadang membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk hadir sehingga jumlah peserta belum selalu memenuhi target. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pada waktu yang lebih memungkinkan, seperti pagi hari atau di luar jam kerja, dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaksana dan masyarakat sasaran. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat dan kegiatan sosialisasi mampu menjangkau lebih banyak warga.

Kedua, Bakesbangpol Kota Surabaya perlu mulai mengembangkan penggunaan media digital sebagai pendukung kegiatan sosialisasi yang selama ini masih banyak dilakukan secara tatap muka. Materi wawasan kebangsaan dapat dikemas dalam bentuk konten edukatif yang sederhana dan mudah dipahami, kemudian disebarluaskan melalui media sosial maupun grup WhatsApp RT dan RW. Upaya ini dapat membantu masyarakat mengakses kembali materi sosialisasi tanpa harus selalu mengikuti kegiatan secara langsung. Selain itu, kerja sama dengan kecamatan, kelurahan, RT, RW, Karang Taruna, serta pihak-pihak terkait perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar keterbatasan sumber daya yang dimiliki dapat diatasi melalui koordinasi dan dukungan bersama.

Ketiga, evaluasi program sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil pre-test dan post-test, tetapi juga memperhatikan masukan serta pengalaman masyarakat selama mengikuti kegiatan. Keluhan mengenai waktu pelaksanaan, keterbatasan jangkauan, dan kebutuhan terhadap media sosialisasi yang lebih mudah diakses perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program berikutnya. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan yang nyata, sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak hanya berjalan secara rutin, tetapi juga semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program sosialisasi wawasan kebangsaan dapat terus dikembangkan agar lebih menarik, mudah dijangkau, dan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap konflik sosial.

REFERENSI

Agustiani, R. A., Purnamasari, H., & Putri, L. D. M. (2025). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 24*(1), 88.

Aliy, A. L., Meirinawati, Fanida, E. H., & Oktariyanda, T. A. (2026). Manajemen strategi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata guna pengembangan kawasan wisata Pecinan Kya-Kya Kota Surabaya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3*(6), 548–560. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/11125

Axelsson, K., & Höglund, L. (2024). Strategic management in the public sector: The case of the Swedish Transport Administration. *International Public Management Journal, 27*(4), 609–632.

Bakesbangpol, S. (2025). *Sosialisasi wawasan kebangsaan*. SI ACI. https://bakesbangpol.surabaya.go.id/blog/wawasan-kebangsaan

Basundoro, P. (2012). *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya* (J. A. Khusyairi, Ed.). Elmatera Publishing.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=Rkh4EAAAQBAJ

Dai, Y., & He, R. (2023). Research on the public sector's strategic management process based on dynamic capabilities. *International Journal of Science and Research Archive, 10*(1), 469–477.

David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2019). *Strategic management: A competitive advantage approach* (17th ed.). Pearson.

Diskominfo, K. S. (2025). *Cetak sejarah baru, Surabaya pecahkan rekor MURI: Kota dengan 1.214 inovasi dalam setahun*. Diskominfo Kota Surabaya. https://surabaya.go.id/id/berita/24596/cetak-sejarah-baru-surabaya-pecahkan-rekor-muri-kota-dengan-1-214-inovasi-dalam-setahun

Diskominfo, K. S. (2026). *SITS dan layanan digital terintegrasi perkuat transformasi Smart City Surabaya*. Diskominfo Kota Surabaya. https://surabaya.go.id/id/berita/25117/sits-dan-layanan-digital-terintegrasi-perkuat-transformasi-smart-city-surabaya

Etikan, I. (2022). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5*(1), 1.

Hartanti, E., & Sunarso, S. (2024). Pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. *Agora, 13*(1), 46–56.

Indonesia, T. (2025). *FKDM Jatim ingatkan intoleransi anak ancaman serius bagi kehidupan bangsa*. TIMES Indonesia. https://www.times.co.id/fkdm-jatim-ingatkan-intoleransi-anak-ancaman-serius-bagi-kehidupan-bangsa

JDIH Kota Surabaya. (2021). *Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya*. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4003

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2021). *Fundamentals of strategy*. Pearson.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Kerukunan umat beragama naik, tertinggi dalam 11 tahun*. https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-naik-tertinggi-dalam-11-tahun-3l3Iw

Kurniawan, A. (2009). *Makna nama "Surabaya"*. Scholar UNAIR.

Lapsley, I., & Mattison, O. (2021). *Managing public service: Making informed choices*. Routledge.

Manurung, M., Rares, J. J., & Londa, V. Y. (2026). Kinerja aparatur sipil negara bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, 12*(1).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative data analysis*. SAGE Publications.

Ndrecaj, V., Tlemsani, I., & Mohamed Hashim, M. A. (2025). Unveiling dynamic capabilities in public procurement: Myths, realities, and strategic transformation. *Administrative Sciences, 15*(4), 1–21.

Paryanto, Wance, M., Hadi, A., & Suhu, B. La. (2022). Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Transportation, 4*, 125–223.

Priyowidodo, G., Indrayani, I. I., & Yogatama, A. (2024). Smart government-based governance through digital transformation of public services: Experience of Surabaya City Government, Indonesia. *Perspektif, 13*(4), 1176–1186.

Purbo Briyadi, P., Mustofah, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Smart desa, layanan cerdas: Inovasi digitalisasi pelayanan administrasi di Desa Sabrang, Klaten. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2*(4), 143–163.

Putri, C. V. O., Fernanda, S. Y., & Setiawan, F. (2025). Strategi komunikasi publik Bakesbangpol Kota Madiun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities, 3*, 114–123.

Qonita. (2026). *KemenPAN-RB paparkan capaian pelayanan publik & digitalisasi di 2025*. detikcom. https://news.detik.com/berita/d-8287943/kemenpan-rb-paparkan-capaian-pelayanan-publik-digitalisasi-di-2025

Rukin. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (A. Rofiq, Ed.). Jakad Media Publisher.

Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi inovasi pelayanan publik menuju pemerintahan digital. *Jejaring Administrasi Publik, 17*(1), 54–70.

Satrio, A. M. (2025). *Geger tawuran di Embong Malang, DPRD Surabaya desak Bakesbangpol perkuat deteksi dini*. Beritajatim.com. https://beritajatim.com/geger-tawuran-di-embong-malang-dprd-surabaya-desak-bakesbangpol-perkuat-deteksi-dini

Setyanusa, B., Muspita, N. C., & et al. (2024). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik sosial di Kota Blitar. *Transgenera: Jurnal Sosial, Politik, dan Pemerintahan, 3*(1), 79–82. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/transgenera/article/view/3497

Sukmiridiyanto, Budiono, P., & Mukhlis, M. (2024). Peran krusial manajemen strategi dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. *Jurnal Kebijakan Publik, 11*(2), 55–112.

Surabaya, B. (2025). *Tentang kami*. SI ACI. https://bakesbangpol.surabaya.go.id/about

Surabaya, P. K. (2025). *Sejarah Kota Surabaya*. Diskominfo Kota Surabaya. https://surabaya.go.id/id/page/0/11000/sejarah-kota-surabaya

Usman, A., Alimuddin, Albahrun, Y. B., Ahmad, A. I., & Kamal, A. N. (2026). Implementation of strategic management in improving public sector organizational performance. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 9*(1), 3133–3145.

Victoria, A. O. (2025). *BNPT: Kelompok teror sesuaikan strategi dengan perkembangan zaman*. ANTARA News. https://m.antaranews.com/amp/berita/5312329/bnpt-kelompok-teror-sesuaikan-strategi-dengan-perkembangan-zaman

Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (2018). *Strategic management and business model* (15th ed.). Pearson.

Yosarie, I., & Hasan, H. (2025). *Indeks Kota Toleran Tahun 2025* (I. Hasani, Ed.). SETARA Institute. https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2025/05/Ebook_IKT2024_SETARA-INSTITUTE_compressed.pubah